

KONFLIK INTERNASIONAL

A. Perselisihan Teritorial.

Di antara konflik internasional yang dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam dua variasi : Perselisihan teritorial (mengenai garis perbatasan) dan konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan.

Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif. Negara pun tidak akan cepat melupakan wilayah yang hilang secara paksa, seperti tatkala mengalahkan Perancis pada tahun 1871, Jerman mengambil provinsi Perancis, yaitu Alsace dan Lorreine. Perancis merasa tidak senang atas kehilangan tersebut dan rasa nasionalisme rakyat Perancis membuat sulit pendudukan Jerman atas wilayah tersebut. Pada akhirnya dikembalikan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia ke I. Hasil dari pengembalian wilayah yang hilang dinamakan "*irredentism*". Hal ini adalah bentuk dari nasionalisme yang mengarah secara langsung kepada konflik yang serius antar negara bagian.

Karena hubungannya dengan integritas negara, wilayah menjadi jauh lebih berharga daripada nilai ekonomi atau strategi yang mereka ambil secara bersamaan, misalnya setelah Israel dan Mesir berdamai pada tahun 1978, mereka menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama beberapa dekade mengenai Taba, alur pantai di mana developer Israel telah membangun hotel melebihi garis perbatasan lama. Kedua negara akhirnya menyerahkan isu tersebut kepada hukum arbitrase, dan akhirnya daerah tersebut ditetapkan menjadi milik Mesir. Memperoleh kembali setiap inci wilayah negara,

bagi Mesir merupakan masalah kehormatan nasional dan simbol dari kedaulatan dan integritas teritorial yang menegaskan status daerah tersebut sebagai bagian dari negara Mesir. Hal yang sama dirasakan dirasakan oleh Perancis berkaitan dengan Alsace – Lorraine.

Pengecualian untuk sikap terhadap wilayah ini digunakan untuk hal yang berhubungan dengan koloni dan kepemilikan teritorial lain dari negara. Karena hal itu bukan bagian dari wilayah pusat atau berhubungan dengan ide bangsa, maka hal itu hanya bernilai sebagai properti yang dapat dimenangkan, hilang, dijual atau diperdagangkan dalam kesepakatan politik dan perang. Hal ini terjadi pada Perancis dan Rusia yang menjual wilayah mereka masing-masingdi Lousiana dan Alaska (yang bernilai karena sumberdaya alam yang dikandungnya, ataupun karena lokasi geopolitisnya) kepada Amerika Serikat

Sebagai contoh, Inggris sejak 1704 telah mengklaim Selat Gibraltar untuk masuk ke Mediterania, lalu Amerika Serikat sejak 1898 memiliki pulau Guam di Pasifik, yang digunakan sebagai basis militer. Tetapi kemudian dengan makin sedikitnya koloni yang tertinggal, sebagian besar wilayah dunia merupakan wilayah pusat bagi beberapa negara.

Nilai suatu wilayah dalam wilayah pusat suatu negara sepertinya tidak berkurang, walaupun pengurangan kejelasan dalam nilai yang melekat pada wilayah melebihi waktu, seperti teknologi yang telah berkembang. Secara historis, wilayah merupakan basis dari produksi ekonomi, agrikultur dan penyediaan bahan mentah, bahkan dalam masa Sun Tzu pernah dikatakan, “tanah adalah dasar dari Negara”, karena pada masa itu dalam masyarakat pertanian, sistem internasional berkembang.

Kemenangan dan kekalahan dalam perang artinya memperoleh atau kehilangan wilayah, bersamaan dengan kekayaan dan kekuasaan dalam jangka panjang. Pada abad 20, bagaimanapun lebih banyak kemakmuran diperoleh dari perdagangan dan teknologi daripada agrikultur. Harga dari sebagian besar perselisihan teritorial, tampak lebih banyak pada keuntungan ekonomi daripada wilayah.

B. Alat-alat Pengendali Wilayah.

Dalam sejarah, alat-alat militer telah menjadi senjata yang efektif untuk mengendalikan wilayah, dan perang sering membuat batas-batas baru antar negara.

Kekuatan militer dapat digunakan untuk mengendalikan wilayah dengan cara yang tidak dapat dikalahkan oleh alat lain, kecuali oleh alat militer lainnya. Contoh ketika Saddam Hussein membuat batas baru Irak dengan menginvasi wilayah Kuwait, dipahami bahwa tidak ada cara yang lebih baik (apa itu sanksi ekonomi, isolasi diplomatik ataupun negoisasi), selain menggunakan kekuatan militer itu sendiri.

Sejak Perang Dunia ke II, telah ada norma yang kuat dalam sistem internasional, untuk menentang usaha-usaha mengubah batas negara dengan paksa. Beberapa usaha mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat internasional, itulah sebabnya mengapa ketika Irak menginvasi Kuwait dan menghapus batas negaranya, sebagian besar negara mengecam tindakan tersebut. Perang melawan Irak, sepertinya menggarisbawahi pesan bahwa setelah perang dingin, batas-batas internasional tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya dengan mempertimbangkan pelanggaran yang kecil dari suatu negara hanya untuk merobohkan pemerintahan lain dan menerapkan rezim boneka, yang dilakukan melalui jalan kekerasan, karena walaupun kedaulatan negara telah jelas-jelas dilanggar, tetapi integritas teritorialnya tidak terganggu. Prinsipnya walaupun pemerintahan dapat berganti, tetapi batas-batas negara akan tetap.

Norma integritas teritorial diilustrasikan pada tahun 1992, ketika kelompok nasionalis Pakistan mencoba untuk menyeberangi batas ke populasi India dengan bantuan kelompok Muslim, polisi Pakistan menembaki para nasionalis mereka sendiri, untuk mencegah mereka mendekati batas (dan mungkin meneruskan berperang dengan India). Walaupun aksi orang-orang Pakistan tersebut menjunjung tinggi integritas perbatasan, tetapi demokrat barat tidak menyetujui penggunaan kekerasan oleh polisi Pakistan untuk melawan kelompok nasionalis tersebut.

C. Pemisahan.

Usaha-usaha provinsi dan wilayah untuk berpisah dari negara induknya, adalah model khusus dari konflik perbatasan. Bukan batas dari dua negara, tetapi usaha dari bagian negara itu sendiri untuk membuat perbaikan sendiri sebagai negara baru. Sebagian besar pemisahan diri ini terjadi hampir di seluruh dunia, dengan kadar keefektifan politis yang berbeda-beda, tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang

sukses untuk berpisah. Negara induk hampir mencoba untuk menahan wilayah tersebut tetap menjadi bagiannya.

Sebagai contoh, Republik Chechnya yang kaya akan minyak dengan penduduk mayoritas Islam dan merupakan salah satu bagian dari Republik Russia (Federasi Rusia), mencoba untuk memisahkan diri dari Rusia pada awal tahun 1990-an setelah Uni Soviet runtuh. Pada tahun 1994 – 1995, Rusia mengirimkan kekuatan militer yang besar untuk menghancurkan ibukota Chenchon, tetapi menghadapi perlawanan yang sengit dari gerilyawan nasionalis Chenchon dan akhirnya mundur dengan kekalahan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, perang pemisahan diri dapat menjadi besar dan mematikan dan mereka dapat dengan mudah menetapkan batas internasional baru atau menariknya dari negara lain. Munculnya penyeberangan perbatasan ini terutama sekali terjadi apabila anggota dari kelompok etnis atau kelompok religi menjangkau dua sisi perbatasan, tetapi menjadi minoritas di negara lain. Pola ini ditemukan dalam kasus-kasus di Bosnia-Serbia, Moldova-Russia, Irak-Iran dan India-Pakistan. Dalam beberapa kasus pra pejuang pemisahan diri berharap untuk menggabungkan wilayah mereka dengan negara yang berdekatan (seperti dalam usaha untuk mendirikan “Greater Serbia”), di mana menghasilkan sejumlah penarikan batas internasional, tetapi norma-norma internasional tidak menghendaki hasil dengan cara tersebut.

Norma internasional yang kuat tentang kedaulatan dan integritas teritorial, memperlakukan gerakan pemisahan diri sebagai masalah dalam negeri yang kurang berpengaruh kepada negara lain. Dalam kasus Chechnya, pemerintah negara-negara barat memfokuskan bukan pada tujuan Rusia untuk mengontrol republiknya, tetapi hanya pada metode perang yang dilakukan, termasuk membombardir dan menembaki area sipil. Aksi ini melanggar standarisasi Hak Azasi manusia (HAM), karena hal itu merupakan perangkat terlemah dari norma-norma yang mengembangkan kedaulatan negara.

Walaupun konflik pemisahan diri seringkali melanggar batas internasional, seperti penyerbuan Turki ke Irak pada tahun 1995, komunitas internasional cenderung memperlakukan permasalahan tersebut secara ringan, apabila penyerbuan melewati perbatasan tersebut bersifat sementara. Prinsip umumnya adalah : “bahwa ada negara-negara yang mempunyai masalah dalam negeri masing-masing dan terdapat kelompok-

kelompok atau daerah yang tidak puas, jadi negara-negara harus bersatu dalam kedaulatan integritas teritorial”.

Kekacauan permasalahan perbatasan telah tercipta dalam beberapa kasus terbaru, di mana negara multinasional pecah menjadi beberapa bagian. Dalam beberapa kasus, perbatasan yang tadinya internal menjadi batas internasional, dan sejak perbatasan baru tersebut, mereka akan lebih peka terhadap tantangan. Contoh dalam kasus Yugoslavia, di mana kelompok etnis yang telah bercampur dan menikah, meninggalkan populasi campuran di dalam Republik Yugoslavia. Ketika Yugoslavia pecah pada tahun 1991 – 1992, beberapa negara bagian mengumumkan kemerdekaan mereka sebagai negara terpisah, diantaranya Kroasia dan Bosnia. Penduduk Kroasia dan Bosnia terdiri dari minoritas suku Serbia. Serbia melakukan kendali efektif (melalui wajib militer lokal, Serbia dengan dukungan angkatan perang pemerintah pusat Yugoslavia yang didominasi oleh Serbia) atas wilayah Kroasia dan Bosnia yang signifikan meliputi masyarakat Serbia yang berhubungan secara geografis. Penduduk non Serbian di dalam wilayah ini telah diusir atau dibantai (“*ethnic cleansing*”). Ketika Kroasia dikalahkan kembali pada tahun 1995, sebagian besar penduduk Serbia yang ada melarikan diri dari Kroasia. Nasionalisme etnis (kesukuan) lebih kuat dari toleransi multi etnik, baik di Serbia maupun Kroasia, dan hal ini membuat timbulnya masalah perbatasan.

Pecahnya suatu negara seharusnya tidak mendorong ke arah kekerasan. Cekoslovakia terbelah menjadi Republik Ceko dan Slovakia dalam suasana kerjasama dan tata tertib sipil. Pecahnya Uni Soviet tidak mendorong ke arah perselisihan wilayah di antara republik dalam banyak kasus, bahkan kelompok etnis telah dipisahkan melewati perbatasan internasional baru (seperti Ukraina – Rusia).

Norma yang menentang pelanggaran perbatasan tidak dapat diterapkan pada kasus dekolonisasi, hanya keberadaan integritas teritorial negara yang dilindungi oleh norma internasional. Sebagai contoh, ketika kerajaan Portugal pecah pada tahun 1975, koloni Timor Timur diinvasi dan kemudian menjadi bagian dari Indonesia.

Masalah Chechnya pada intinya sebagai salah satu pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia, sama halnya ketika Spanyol menarik diri dari koloninya Sahara bagian barat (Afrika Utara), negara tetangganya Maroko mencoba mengambil wilayah yang kaya posfat melalui kelompok gerilyawan yang ingin mengukuhkan negara merdeka.

Negara tetangga lain Mauritania juga mengklaim sebagian dari wilayah tersebut untuk sementara.. Hasil konflik ini menarik perhatian komunitas internasional (PBB mensponsori referendum untuk menentukan status wilayah tersebut).

Perpindahan Hongkong dari Inggris ke dalam kendali Cina pada tahun 1997, juga memberi gambaran bagaimana wilayah kolonial dapat dikeluarkan (perspektif Inggris), sementara wilayah pusat hampir diabaikan (perspektif Cina). Perpindahan Hongkong secara damai adalah salah satu kasus pada saat ini yang menunjukkan bahwa dalam sistem internasional, wilayah dapat berpindah tangan.

D. Perbatasan Antar Negara Bagian.

Perselisihan perbatasan antar negara dianggap serius oleh komunitas internasional, tetapi tidak seperti konflik pemisahan diri. Norma integritas wilayah, tidak begitu penting dalam konflik perbatasan di antara negara yang sudah diakui. Dapat saja terjadi, bagian besar dari wilayah dialihkan antar negara melalui perjanjian perdamaian atau kontrak penyatuan. Sebagai contoh, sebelum dan pada saat Perang Dunia ke II, perbatasan Soviet bergeser ke bagian timur Polandia, sementara perbatasan Jerman dengan Polandia menuju barat dijanjikan untuk mengganti kerugian,

Sejak tahun 1945, hanya sedikit sekali wilayah yang berpindah tangan antar negara melalui kekerasan yang diakui. Beberapa usaha telah dilakukan, tetapi gagal, contoh ketika Irak menyerang Iran pada tahun 1980, salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol jalan air Shatt-al Arab (untuk akses menuju teluk Persia), karena memiliki nilai komersial dan strategis. Tetapi setelah 10 tahun dan jutaan orang menjadi korban, perbatasan Iran – Irak tidak mengalami perubahan.

Beberapa pulau telah berpindah tangan melalui perang, tetapi terjadi dalam jumlah kecil, hal ini tidak mengubah formasi negara baru dan bagian dari yang lama.

Jika perselisihan teritorial antar negara yang berdaulat terjadi, seringkali dapat diselesaikan secara damai, khususnya ketika wilayah yang terlibat merupakan perbandingan kecil dengan negara yang dipermasalahkan. Uni Soviet setuju dengan pilihan batas Cina pada tahun 1986, setelah kedua negara berselisih mengenai kepemilikan pulau sungai kecil selama bertahun-tahun. El Salvador dan Honduras menempuh Pengadilan Internasional untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan

mereka pada tahun 1992, dan tahun 1994. Panel dari Hakim Amerika Latin memutuskan perselisihan panjang mengenai perbatasan antara Argentina dan Chile mengenai daerah pegunungan yang mereka klaim. Setelah negara menyerahkan perselisihan untuk diputus secara arbitrase, wilayah tersebut dimenangkan Argentina dan mengundang protes dari Chile.

E. Perselisihan Berkepanjangan.

Pada abad 20, hanya sedikit terjadi perselisihan perbatasan antar negara, tetapi hal itu tetap menjadi pemicu konflik internasional yang penting. Di antaranya yang paling sulit adalah batas negara Israel, yang tidak pernah secara kuat diakui dan dikenali oleh negara tetangganya.

Bentuk gencatan senjata pada tahun 1948 sebagai hasil perang kemerdekaan, meluas pada perang 1967, kemudian disepakati lagi dalam batas Mesir dengan perjanjian perdamaian "Camp David" tahun 1978. Sisa wilayah yang diduduki pada tahun 1967, adalah dari Jordan, Jalur Gaza dekat Mesir, dan "Golan Heights" di Syria, merupakan wilayah konflik Arab – Israel. Perjanjian Palestina – Israel tahun 1993 – 1995 berusaha memindahkan otonomi Palestina sebagai bagian dari West bank dan Jalur Gaza, tetapi perbatasan Palestina ini sampai tahun 1997 tidak dapat dipecahkan.

Perselisihan perbatasan yang besar lainnya adalah Area Kashmir, antara India, Pakistan dan Cina. Selain itu di antara Republik Soviet dahulu, perselisihan yang paling serius adalah antara Nagorno – Karabakh, wilayah populasi Armenia dengan negara tetangganya Azerbaijan. Setelah menempuh perang yang memakan biaya besar, Armenia akhirnya memperoleh kendali militer di daerah tersebut. Kemudian terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina mengenai Semenanjung Crimean, yang dahulu milik Rusia, tetapi menjadi bagian dari Ukraina sejak 1950-an.

Peru dan Equador bertempur untuk memperjuangkan perbatasan pada tahun 1945, tentang jalan masuk daerah pegunungan terdekat, bagian terbesar area tersebut dimiliki Peru menyusul kemenangannya dalam perang singkat dengan Equador pada tahun 1941. Konflik yang melibatkan aset yang tidak terukur, berharga untuk diperjuangkan, digambarkan berkekuatan mistis dari wilayah, sebagai sumber dari kehormatan nasional,

dan melanjutkan kegunaan nasionalisme untuk memacu dukungan bagi pemimpin negara (popularitas kedua presiden meningkat ketika konflik terjadi).

Sebagian besar negara di dunia mengalami perselisihan teritorial antar negara bagian, dan sering kali perhatian pada pulau kecil yang memiliki keuntungan strategis, sumber daya alam (seperti minyak lepas pantai) atau hak mengambil kekayaan laut. Cina menegaskan haknya mengenai Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, yang lebih dekat ke Vietnam, Filipina, Malaysia maupun Brunei dari pada ke Cina, dan juga Taiwan mengklaim sebagian atau sepenuhnya. Semua negara kecuali Brunei telah bersiap-siap dengan menempatkan pasukan militernya untuk mempertahankan klaim mereka, mengingat kepulauan dan perairan sekitarnya konon banyak menyimpan persediaan minyak. Pada tahun 1992, semua negara setuju untuk menahan diri dari aktifitas tersebut dan mengupayakan solusi perdamaian (armada laut Cina dan Vietnam telah bertempur di sana sejak 1988). Tetapi pada tahun 1995, Cina menduduki karang kecil dekat Filipina dan mengibarkan bendera Cina di sana. Filipina membongkar tempat tersebut dan situasi kembali mereda, dan sejak saat itu konflik Kepulauan Spratly menjadi penting. Hal ini menunjukkan intensitas dari bangkitnya kekuatan besar Cina dan menunjukkan bahwa kevakuman kekuatan telah mencair dengan ditariknya militer Amerika Serikat dari Filipina, Cina dan Jepang. Perselisihan mengenai pulau kecil di tempat lain terjadi juga antara Jepang dan Korea Utara. Perselisihan ini melibatkan saham ekonomi rendah, tetapi menjadi perhatian sentimen nasionalis di kedua pihak yang diilhami oleh kenangan Perang Dunia II.

Perselisihan pulau terkemuka lainnya adalah di Timur tengah antara Iran dan Uni Emirat Arab, mengenai kepemilikan kepulauan kecil dekat mulut Teluk Persia. Pada tahun 1995, Iran dihimbau untuk memindahkan kekuatan militernya termasuk rudal anti serangan udara dan kemungkinan senjata kimia, dari kepulauan yang diperebutkan, dan mereka dapat menjual minyak hasil dari Teluk Persia ke Eropa dan Jepang. Iran tetap mempertahankan garis depan dari pertahanan udara, atau secara ekonomi mengklaim persediaan minyak lepas pantai.

Di Amerika Selatan, Argentina dan Inggris masih mempermasalahkan kendali atas Kepulauan Falkland (Islas Malvinas) yang mereka perjuangkan sejak tahun 1982. Tulang punggung utama pendirian hubungan Rusia dan Jepang adalah kepemilikan

kepulauan Kuril yang kecil tetapi Strategis, diduduki oleh Uni Soviet pada tahun 1945, dengan kepulauan yang sekarang membawa kontrol zona ekonomi. Konflik internasional mengenai kepulauan akan tidak dapat diperdebatkan secara terus menerus di tahun-tahun mendatang.

F. Perairan Teritorial.

Negara memperlakukan perairan teritorial dekat pantai mereka sebagai bagian dari wilayah nasional mereka. Definisi perairan ini dapat dibedakan oleh tipe penggunaannya dan tidak bersifat universal, tetapi norma-norma telah berkembang kemudian, khususnya ketika UNCLOS (UN Convention on the Law Of the Sea) berlaku. Perairan sejauh 3 mil dari pantai secara tradisional diakui sebagai teritorial, tetapi di luar itu ada perselisihan tentang seberapa jauh kedaulatan nasional meluas dan untuk tujuan apa. UNCLOS secara umum memperbolehkan 12 mil untuk pemancingan dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) termasuk pemancingan dan hak mineral (tetapi menjadi perairan bebas navigasi), dan ZEE melindungi 3 benua di dunia.

Tetapi zona ini sangat tumpang tindih, dan garis pantai tidaklah lurus, jadi beberapa pertanyaan mengenai interpretasi muncul tentang bagaimana untuk menggambarkan teritorial dan perairan ekonomis. Sebagai contoh, Libia mengklaim kepemilikan keseluruhan teluk Sidra, memperlakukannya sebagai pantai, sementara Amerika Serikat memperlakukannya sebagai lengkungan di garis pantai dan meminta dengan tegas bahwa sebagian besar adalah perairan internasional dan pada tahun 1986, Amerika Serikat mengirim armada perang ke Teluk Sidra untuk menegaskan hal itu. Pesawat Amerika Serikat menembak jatuh 2 pesawat jet Libia yang menantang manuver armada Amerika Serikat. Lebih sedikit dramatis, Kanada pada tahun 1994 – 1995 mengirim Angkatan Lautnya untuk mengganggu perahu nelayan Spanyol yang menurut perkiraannya telah melanggar hak ekonomis Kanada di Atlantik Utara, hanya sedikit di luar zona 200 milnya. Di laut Okhotsk, ZEE Rusia mencakup keseluruhan perairan, kecuali “lobang donat” kecil yang merupakan perairan internasional ditengahnya. Kapal-kapal non Rusia memancing ikan secara intensif di daerah tersebut, yang tentu saja menghabiskan stok ikan di ZEE Rusia.

G. Perbatasan Udara.

Perbatasan udara di atas suatu negara dipertimbangkan sebagai wilayah negara. Setiap pesawat yang akan melintasi wilayah negara harus memperoleh ijin dari negara tersebut. Contoh penyerbuan pesawat tempur Amerika Serikat yang berbasis di Inggris ke Libia tahun 1986, harus memutar jauh melalui Samudra Atlantik, karena Perancis tidak memberi ijin wilayah udaranya dilewati pesawat tempur Amerika Serikat.

Orbit udara (mulai 60 mil ke atas), bagaimanapun dipertimbangkan sebagai wilayah internasional seperti lautan. Hal ini berdasarkan 3 pertimbangan praktis. Pertama, satelit bergerak sangat cepat dan tidak mudah berubah haluan untuk menghindari wilayah suatu negara. Kedua, dengan sedikit pengecualian, negara dapat menembak jatuh pesawat asing di atas wilayah mereka, tetapi kekurangan alat teknis untuk menembak jatuh satelit. Ketiga, satelit telah menjadi alat yang sangat berguna bagi semua kekuatan besar sebagai alat intelejen bersama. Tidak ada negara yang menembak jatuh satelit milik negara lain, dan walaupun ada hal itu akan dianggap sebagai tindakan tidak lazim yang melanggar azas kepatutan.

Sumber :

Terjemahan dari “*International Relations*”, Third Edition, Joshua S. Goldstein, halaman 199 – 206.

DAFTAR PUSTAKA

Internasional Relations, Third Editions, Joshua.S. Goldstein, Halaman 199 – 206.

KONFLIK INTERNASIONAL

MAKALAH

Oleh :

Dra. Dewi Utariah

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i.
DAFTAR ISI.....	ii.
A. Perselisihan Teritorial.....	1.
B. Alat-alat Pengendali Wilayah.....	2.
C. Pemisahan.....	3.
D. Perbatasan Antar Negara bagian.....	6.
E. Perselisihan Berkepanjangan.....	7.
F. Perairan Teritorial.....	9.
G. Perbatasan Udara.....	10.
DAFTAR PUSTAKA.....	11.

KATA PENGANTAR

Segala usaha untuk mengorganisasikan sistem internasional merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama saja tidak akan mampu mengendalikan semua negara anggota, semua perubahan dalam hubungan, merupakan hasil daripada konflik yang diselesaikan secara damai atau secara kekerasan.

Persaingan adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang berawal dari perkembangan sistem negara kebangsaan, sehingga konflik internasional merupakan masalah yang tidak terhindarkan dalam politik dunia.

Sumber konflik terletak dalam hubungan antara sistem negara-negara kebangsaan itu sendiri yang dilandasi oleh konsep ego centered.

Sasaran mutlak suatu negara cenderung menimbulkan konflik antar negara, antara lain adalah : peningkatan kekuatan, pertahanan unilateral dari integritas wilayah dan kemerdekaan politik.

Makalah ini menggambarkan mengenai konflik dengan sasaran keseimbangan yaitu ekspansionisme atau perluasan wilayah.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi mereka yang memerlukannya sebagai referensi.

Desember, 2006

Penulis,

Dewi Utariah